

# IMPLEMENTASI PROGRAM PAITUA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI KABUPATEN SORONG

Anggi Shintia Margaretha Okoka  
NPP. 32.1098

Asdaf Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya  
Program Studi Studi Kebijakan Publik  
Email: [32.1098@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1098@praja.ipdn.ac.id)

Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Romi Saputra, Sos, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement:** The implementation of the Old Age Protection Program (PAITUA) in Sorong Regency faces various challenges, including limited resources, remote geographical locations, inaccurate beneficiary data, and insufficient socialization efforts, all of which affect the effectiveness of aid distribution to the elderly. **Purpose:** his study aims to analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the PAITUA Program and to evaluate the effectiveness of resource allocation and the distribution of benefits to beneficiaries in Sorong Regency. **Method:** A descriptive method with a qualitative approach was used, involving secondary data collection and field observation. The analysis focused on evaluating resources, inter-agency coordination, and the distribution of beneficiaries based on the 2023 fiscal year data. **Result:** The findings indicate that successful implementation of the PAITUA Program is supported by strong internal coordination and collaboration with distribution partners such as Bank BRI. However, several barriers remain, including a lack of personnel, geographic difficulties, data mismatches, and poor socialization of the program. The distribution of beneficiaries is also uneven, with the highest concentration in Sorong City. **Conclusion:** The success of the PAITUA Program's implementation heavily depends on the availability of sufficient resources as well as their proper allocation and utilization. There is a need for improved outreach, more accurate beneficiary data, and strengthened inter-agency coordination to address existing obstacles. **Keywords:** Policy Implementation, Elderly Welfare, Paitua Program

## ABSTRAK

**Permasalahan:** Implementasi Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) di Kabupaten Sorong menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, jarak geografis yang jauh, ketidaktepatan data penerima manfaat, serta kurangnya sosialisasi yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan kepada lansia. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program PAITUA serta mengevaluasi efektivitas alokasi sumber daya dan distribusi manfaat kepada penerima di Kabupaten Sorong. **Metode:** Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan. Analisis difokuskan pada evaluasi sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan distribusi penerima manfaat berdasarkan data tahun anggaran 2023. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PAITUA didukung oleh koordinasi internal yang baik dan kolaborasi dengan mitra penyalur seperti Bank BRI. Namun, faktor penghambat meliputi

keterbatasan personil, kendala geografis, ketidaksesuaian data, serta kurangnya sosialisasi program. Sebaran penerima manfaat juga tidak merata, dengan konsentrasi terbesar di Kota Sorong. **Kesimpulan:** Keberhasilan implementasi Program PAITUA sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai serta alokasi dan pemanfaatan yang tepat. Perlu peningkatan sosialisasi, perbaikan data penerima, dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk mengatasi hambatan yang ada.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, Kesejahteraan Lanjut Usia, Program Paitua

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sorong mengalami dinamika demografis yang ditandai oleh peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia di Kabupaten Sorong pada tahun 2021 tercatat sebanyak 6.209 jiwa. Angka ini meningkat menjadi 6.309 jiwa pada tahun 2022, dan terus bertambah hingga mencapai 6.592 jiwa pada tahun 2023. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan menuju *aging population*, yakni bertambahnya proporsi penduduk usia lanjut dalam struktur populasi. Peningkatan jumlah lansia ini membawa konsekuensi serius terhadap kebutuhan akan perlindungan sosial, akses pelayanan kesehatan, serta jaminan kesejahteraan yang memadai. Lansia, khususnya yang tidak memiliki penghasilan tetap atau masuk dalam kategori miskin, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap keterlantaran, kemiskinan ekstrem, serta masalah kesehatan akibat kekurangan gizi dan perawatan yang layak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan program yang responsif dan berkelanjutan guna menjamin kehidupan lansia yang layak, bermartabat, dan mandiri. Berbagai negara telah menunjukkan urgensi intervensi perlindungan sosial bagi lansia. Di Korea Selatan, misalnya, Kwon (2008) menekankan pentingnya pembiayaan publik jangka panjang untuk mendukung sistem perawatan lansia, terutama dalam menghadapi perubahan struktur keluarga dan meningkatnya usia harapan hidup. Di Thailand, Jitapunkul dan Wivatvanit (2008) menjelaskan keberhasilan Rencana Aksi Nasional untuk Lansia dalam membentuk masyarakat yang ramah usia melalui promosi kesehatan dan perlindungan sosial yang terintegrasi. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Naz et al. (2021) di Pakistan, yang mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan bagi lansia sangat dipengaruhi oleh status ekonomi, pendidikan, serta lokasi geografis—kondisi yang juga relevan dengan tantangan geografis di Kabupaten Sorong.

Di Indonesia sendiri, kajian-kajian mengenai kesejahteraan lansia masih banyak berfokus pada pendekatan deskriptif umum. Studi oleh Rahmah dan Rifka (2018), misalnya, meneliti efektivitas Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Jambi, yang secara konseptual relevan untuk dikembangkan dalam pendekatan perlindungan sosial lansia berbasis komunitas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sorong melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) atau yang dikenal sebagai Program Kasih Orang Tua pada tahun 2023. Program ini ditujukan bagi lansia berusia 65 tahun ke atas yang tergolong tidak mampu atau tidak memiliki sumber penghidupan tetap. PAITUA bertujuan untuk:

1. Memberikan jaminan pendapatan minimum bagi lansia;
2. Mengurangi risiko sosial seperti keterlantaran dan kemiskinan ekstrem;
3. Meningkatkan kualitas hidup melalui bantuan finansial yang rutin dan berkelanjutan.

Bantuan yang diberikan berupa bantuan sosial tunai sebesar Rp250.000 per bulan, disalurkan secara non-tunai melalui Bank Papua. Pendekatan ini mencerminkan prinsip transparansi dan efisiensi sebagaimana dianjurkan dalam literatur global (Graham, 2010), di mana akuntabilitas sistem keuangan

memainkan peran kunci dalam efektivitas program sosial. Namun, implementasi kebijakan semacam ini memerlukan dukungan sistemik lintas sektor. Axelsson (2006) menggarisbawahi pentingnya integrasi antar lembaga dalam pelayanan publik agar kebijakan sosial dapat berjalan secara optimal. PAITUA sendiri melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bank Papua, aparat kampung/kelurahan, dan masyarakat setempat dalam pelaksanaannya, mulai dari pendataan hingga pengawasan. Lebih dari sekadar bantuan finansial, PAITUA diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan psikososial lansia. Studi Lee et al. (2019) menunjukkan bahwa kesepian dan isolasi sosial memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental lansia. Oleh karena itu, kehadiran program sosial yang bersifat inklusif dapat menjadi sumber motivasi dan rasa dihargai di kalangan lansia, sebagaimana juga ditekankan oleh Kanamori et al. (2014) yang menemukan bahwa partisipasi sosial dapat menurunkan risiko disabilitas fungsional pada lansia. Dengan demikian, kehadiran Program PAITUA tidak hanya menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, tetapi juga sebagai strategi untuk mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan di wilayah timur Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara kritis implementasi program PAITUA, menilai efektivitasnya, serta mengidentifikasi tantangan di lapangan, guna memberikan masukan yang relevan bagi perbaikan kebijakan sosial lansia yang berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berbagai penelitian internasional dan nasional telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas pemahaman tentang isu kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia (lansia), baik dari aspek kebijakan, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Meng et al. (2015) dan Kwon (2008) menyoroti pentingnya integrasi skema asuransi kesehatan dan pembiayaan publik jangka panjang untuk menjamin perlindungan sosial bagi lansia. Di sisi lain, penelitian oleh Jitapunkul & Wivatvanit (2008) di Thailand menunjukkan keberhasilan kebijakan nasional dalam menciptakan masyarakat ramah usia melalui rencana aksi nasional. Sementara itu, penelitian Graham (2010) dan Costa (1999) di negara maju lebih menekankan pada kebijakan tunjangan pensiun dan perencanaan keuangan menjelang masa tua. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut masih bersifat makro dan berbasis pada kebijakan nasional atau sistem kesejahteraan sosial negara maju dan kawasan urban, serta belum menyentuh pada konteks kebijakan daerah berbasis bantuan tunai yang bersifat lokal. Di Indonesia sendiri, studi oleh Rahmah & Rifka (2018) memang menyoroti penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, namun tidak secara spesifik menelaah program perlindungan lansia, apalagi program daerah seperti PAITUA di Sorong. Begitu pula dengan studi-studi yang berfokus pada aspek psikososial (Lee et al., 2019; Tengku Mohd et al., 2019), lingkungan tempat tinggal (Pei & Tang, 2012), maupun kesehatan lansia (Kanamori et al., 2014; Karasek, 2004), yang meskipun relevan, belum mengulas secara langsung implementasi kebijakan bantuan langsung tunai bagi lansia di wilayah 3T seperti Kabupaten Sorong. Lebih lanjut, belum ditemukan penelitian terdahulu yang mengkaji secara simultan bagaimana kebijakan PAITUA dirancang, diimplementasikan di tingkat teknis oleh aparat daerah, serta bagaimana persepsi masyarakat lansia sebagai penerima manfaat terhadap kebermanfaatan program tersebut. Penelitian sebelumnya juga belum banyak yang mengkaji pentingnya keberadaan basis data lansia yang valid dan mutakhir sebagai prasyarat keberhasilan program. Padahal, data menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan sosial yang akuntabel, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Lutomski et al. (2013) di Belanda melalui pengembangan sistem data TOPICS-MDS.

Hal ini menunjukkan keterbatasan kajian yang benar-benar mengevaluasi mekanisme pelaksanaan program perlindungan lansia berbasis bantuan tunai langsung oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam:

- Evaluasi implementasi program lokal seperti PAITUA secara menyeluruh, termasuk pada aspek validitas data penerima, distribusi bantuan, serta koordinasi antar level pemerintahan daerah.
- Kajian berbasis wilayah Indonesia Timur, khususnya konteks sosial-kultural dan geografis Kabupaten Sorong yang memiliki tantangan infrastruktur dan aksesibilitas.
- Penelaahan persepsi langsung dari lansia sebagai penerima manfaat, yang jarang dijadikan fokus utama dalam studi-studi terdahulu (berbeda dari pendekatan data besar seperti TOPICS-MDS di Belanda oleh Lutomski et al., 2013).

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi internasional maupun nasional telah dilakukan untuk menelaah isu-isu seputar kesejahteraan dan perlindungan bagi lansia dari berbagai perspektif kebijakan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Studi lokal oleh (Rahmah & Rifka, 2018) mengulas efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Jambi, yang relevan untuk melihat bagaimana pendekatan pemberdayaan masyarakat juga dapat diaplikasikan dalam konteks peningkatan kesejahteraan lansia di wilayah pedesaan. Penelitian oleh Meng et al., (2015) menyoroti pentingnya konsolidasi skema asuransi kesehatan sosial di Tiongkok untuk mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan antar kelompok populasi, termasuk lansia. Upaya integrasi ini dinilai vital untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Selaras dengan itu, studi oleh Kwon, (2008) di Korea menekankan kebutuhan pembiayaan publik jangka panjang untuk perawatan lansia akibat perubahan struktur keluarga dan peningkatan usia harapan hidup. Thailand melalui studi Jitapunkul & Wivatvanit, (2008) menunjukkan keberhasilan penerapan kebijakan nasional melalui Rencana Aksi Nasional untuk Lansia, termasuk promosi kesehatan dan perlindungan sosial, yang terbukti mendukung penciptaan masyarakat ramah usia. Di Pakistan, studi Naz et al., (2021) menemukan bahwa akses terhadap layanan kesehatan bagi lansia dipengaruhi oleh usia, status ekonomi, pendidikan, serta lokasi tempat tinggal, menunjukkan adanya ketimpangan geografis dan sosial dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Di negara maju, penelitian menunjukkan bagaimana program bantuan usia lanjut di Amerika Serikat berpengaruh terhadap pola tempat tinggal lansia perempuan tidak menikah, mencerminkan dampak kebijakan tunjangan terhadap otonomi lansia (Costa, 1999). Di Kanada, Graham, (2010) menganalisis peran akuntansi dalam membentuk perilaku keuangan warga menjelang pensiun dan peranannya dalam merancang kebijakan pensiun nasional. Data besar juga menjadi pendekatan penting dalam perumusan kebijakan lansia, sebagaimana dijelaskan dalam studi Lutomski et al., (2013) melalui pengembangan *The Older Persons and Informal Caregivers Survey Minimum DataSet* (TOPICS-MDS), yang menghimpun data dari lebih 32.000 lansia di Belanda. Studi ini memperkuat pentingnya data terintegrasi dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial. Di sisi lain, Hasson et al., (2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi kompleks dalam layanan kesehatan lansia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti responsivitas staf dan kompleksitas program. Studi Pei & Tang, (2010) mengungkapkan bahwa komunitas pedesaan di Tiongkok memiliki potensi dalam menyelenggarakan dukungan usia lanjut, menekankan pentingnya keterlibatan lokal dalam mendukung perlindungan sosial lansia.

Faktor lingkungan juga terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan lansia. Penelitian Pei & Tang, 2012 ) menemukan bahwa lingkungan alam tempat tinggal memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan subjektif lansia. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Kanamori et al., (2014), yang menunjukkan bahwa partisipasi sosial lansia di Jepang secara signifikan mengurangi risiko disabilitas fungsional. Dari sisi psikososial, studi Lee et al., (2019) menyatakan bahwa kesepian berdampak besar terhadap kesehatan mental lansia, dan kebijaksanaan sebagai sifat kepribadian ditemukan sebagai faktor pelindung. Dalam konteks Asia, Tengku Mohd et al., (2019) melalui tinjauan sistematis menemukan bahwa dukungan sosial—baik struktural maupun fungsional—berkaitan dengan rendahnya gejala depresi di kalangan lansia. Lebih jauh, peran aktivitas fisik juga tak kalah penting, seperti ditunjukkan de Oliveira et al., (2019) bahwa lansia aktif memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dan tingkat kecemasan serta depresi yang lebih rendah dibandingkan kelompok sedentari. Melalui sudut pandang teoritis, artikel oleh Axelsson (2006) menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam pelayanan publik untuk mencapai hasil yang optimal dalam layanan kesehatan masyarakat, termasuk bagi lansia. Sementara itu, studi Karasek, (2004) menunjukkan potensi melatonin sebagai agen terapeutik untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam menghadapi penyakit degeneratif terkait usia.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam kajian kebijakan perlindungan sosial lansia, khususnya di tingkat daerah. Pertama, fokus penelitian ini adalah pada implementasi Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) yang merupakan kebijakan spesifik Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada program nasional (Jitapunkul & Wivatvanit, 2008) atau intervensi makro lainnya, penelitian ini mengangkat dinamika lokal, termasuk bagaimana proses pendataan, distribusi bantuan, dan koordinasi lintas sektor dijalankan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses informasi. Kedua, penelitian ini menambahkan perspektif lapangan yang kuat dengan menggali pengalaman dan persepsi langsung dari para lansia sebagai penerima manfaat PAITUA. Pendekatan ini memperkaya analisis karena menghadirkan suara kelompok sasaran secara nyata, yang selama ini kurang terwakili dalam studi kebijakan bantuan sosial yang cenderung menitikberatkan pada data kuantitatif atau dokumen kebijakan semata (berbeda dengan pendekatan Graham, 2010 atau Costa, 1999). Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam konteks wilayah Indonesia Timur, yang selama ini relatif kurang mendapatkan perhatian dalam literatur akademik nasional maupun internasional. Sorong, sebagai wilayah dengan kompleksitas geografis dan sosial yang tinggi, menghadirkan tantangan khas dalam pelaksanaan program sosial, yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan konteks perkotaan atau wilayah Jawa dan Sumatera. Keempat, dengan mengkaji kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan dan teknis berbasis bukti yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan pelaksanaan program PAITUA agar lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur terkait implementasi program sosial daerah untuk lansia di Indonesia Timur, tetapi juga menyumbang kebaruan ilmiah dalam hal pendekatan, konteks, dan fokus kajian.

#### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) bagi lansia di Kabupaten Sorong, mulai dari mekanisme pendataan, proses distribusi bantuan, hingga koordinasi antar instansi yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program tersebut di tingkat distrik dan kampung, sehingga dapat memahami faktor-faktor yang menghambat efektivitas program. Selanjutnya, penelitian ini ingin mengevaluasi dampak yang dirasakan oleh lansia penerima manfaat, khususnya dalam aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Dari hasil evaluasi tersebut, penelitian ini bermaksud memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat memperbaiki pelaksanaan Program PAITUA agar menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Kabupaten Sorong.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks aslinya, bukan dalam situasi yang dibuat-buat seperti eksperimen laboratorium. Dengan menggunakan paradigma postpositivistik, penelitian ini mengakui bahwa realitas sosial memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tidak selalu dapat diukur atau dijelaskan melalui angka-angka kuantitatif semata. Oleh karena itu, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan dan analisis data secara mendalam di lapangan. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kombinasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019:173). Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui kegiatan lapangan seperti wawancara dan observasi. Data ini sangat penting karena secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ingin dijawab. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen resmi, laporan lembaga, buku, jurnal ilmiah, dan data statistik yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung analisis yang dilakukan terhadap data primer sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam (Simangunsong, 2017:230).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Program Perlindungan Hari Tua Di Kabupaten Sorong dari tahun 2023-2024**

#### **1. Organisasi Pelaksana dalam Implementasi Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA)**

##### **A. Peran Organisasi**

Implementasi kebijakan program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) memerlukan peran aktif dari organisasi pelaksana yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program tersebut. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PAITUA di Kabupaten Sorong, dibentuk sebuah organisasi pelaksana bernama Sekretariat Bersama (Sekber). Pembentukan Sekber bertujuan agar proses implementasi program dapat berjalan dengan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lansia di wilayah tersebut. Menurut teori peran organisasi, organisasi merupakan kumpulan individu yang bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, peran organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan PAITUA terlaksana sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Dinas Sosial memiliki peran utama dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, termasuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan PAITUA di tingkat kabupaten. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam koordinasi dengan Sekber di tingkat provinsi serta mendukung administrasi dan keuangan program di tingkat kabupaten. Struktur organisasi pelaksana ini melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Bappeda, Kominfo, BPKAD, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial. Keberadaan Sekber yang merupakan representasi lintas sektoral menjadi fondasi penting dalam menjalankan program PAITUA secara terkoordinasi dan efektif. Struktur Sekber di tingkat kabupaten terdiri atas penanggung jawab yang dijabat oleh Gubernur, tim pengarah, dan Sekber yang diketuai oleh kepala perangkat daerah bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Dengan struktur yang jelas dan kolaborasi antar OPD, pelaksanaan program dapat diselenggarakan secara sistematis dan menyeluruh.

#### **B. Akuntabilitas dalam Implementasi Program PAITUA**

Aspek akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan program PAITUA. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks program ini, Dinas Sosial Kabupaten Sorong menjadi penanggung jawab utama yang mengatur perumusan kebijakan, pelaksanaan operasional, evaluasi, dan pelaporan kepada Bupati. Transparansi anggaran menjadi salah satu indikator utama akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program PAITUA, penganggaran program ini masuk dalam RKA-SKPD dan dijabarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Daya. Anggaran program dialokasikan secara transparan dan disertai daftar penerima manfaat, sehingga memungkinkan pelacakan penggunaan dana secara jelas dan bertanggung jawab. Pada tahun 2023, anggaran program PAITUA Kabupaten Sorong sebesar Rp 840 juta dialokasikan untuk 1.485 penerima manfaat, dengan rincian dana per penerima sebesar Rp 250.000 per bulan, yang berasal dari Rp 150.000 dari provinsi dan Rp 100.000 dari kabupaten. Meski demikian, realisasi program pada tahun tersebut mengalami keterlambatan karena kesalahan pengkodean anggaran. Hal ini menegaskan perlunya pengelolaan keuangan yang cermat dan evaluasi berkala agar program berjalan lancar dan anggaran dapat tersalurkan tepat waktu.

#### **C. Hubungan Kerja Antar Pihak Terkait dalam Program PAITUA**

Hubungan kerja antar pihak terkait merupakan salah satu faktor kunci dalam kesuksesan implementasi program PAITUA. Dalam pelaksanaannya, pemilihan mitra penyalur dana sangat diperhatikan agar dapat memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta menjangkau seluruh wilayah sasaran. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 mengatur kriteria pemilihan bank penyalur program PAITUA yang harus memiliki pengalaman kerja sama dengan pemerintah daerah, kemampuan dalam penyaluran dana program serupa, teknologi inovatif, serta jaringan cabang yang luas di wilayah sasaran. Proses seleksi dilakukan secara terstruktur menggunakan kuesioner untuk menilai berbagai aspek teknis dan operasional bank calon mitra. Berdasarkan kriteria tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) terpilih sebagai mitra penyalur dana program PAITUA di Kabupaten Sorong. Keunggulan Bank BRI terletak pada jaringan luas Bank BRI Link yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sorong, sehingga memudahkan para lansia untuk mengakses dana tanpa harus melakukan perjalanan jauh di daerah yang geografisnya sulit. Bank BRI juga menyediakan buku tabungan, kartu ATM, dan melakukan validasi data penerima bersama Dinas Sosial, sehingga administrasi penyaluran dana dapat berjalan tertib dan terorganisir. Hubungan kerja yang baik antara Sekretariat Bersama dan Bank BRI dalam pelaksanaan program PAITUA menjadi elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyaluran dana. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan lansia dan mengurangi risiko kemiskinan di Kabupaten Sorong.

#### **2. Pedoman Aturan**

Dalam menetapkan kebijakan, keberadaan pedoman aturan atau regulasi sangat penting untuk memudahkan proses implementasi kebijakan tersebut. Peraturan yang jelas menjadi landasan normatif dan operasional yang mengatur secara rinci bagaimana kebijakan dijalankan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Bupati Sorong Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman utama pengelolaan keuangan bantuan sosial, mulai dari prosedur penganggaran, penyaluran, hingga evaluasi efektivitasnya, sehingga pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dapat berjalan dengan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Program Paitua didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023, yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelaksanaan program perlindungan hari tua, antara lain:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
- b. Pelaksana Program Paitua
- c. Perencanaan dan Penganggaran Program
- d. Pendataan Penerima Manfaat
- e. Validasi Data
- f. Verifikasi Akhir
- g. Penetapan Penerima Manfaat
- h. Kriteria Bank Penyalur
- i. Pemutakhiran Data
- j. Pengaduan Keluhan
- k. Pelaporan oleh Bank
- l. Pengendalian
- m. Evaluasi dan Pelaporan oleh Sekretariat Bersama (Sekber)
- n. Sosialisasi dan Komunikasi

Peraturan ini menjadi kerangka kerja utama yang mengatur tata kelola program, mulai dari pembagian wewenang hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi, sehingga program dapat berjalan efektif dan sesuai target.

### **Indikator Dimensi Pedoman Aturan**

- a. Kejelasan Arah/Tujuan  
Pembuat dan pelaksana kebijakan harus memahami dengan jelas maksud dan tujuan kebijakan agar pelaksanaan dapat tepat sasaran. Program Paitua bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia serta penyandang disabilitas, sebagai langkah preventif, fasilitasi kebutuhan pokok, peningkatan kemandirian, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Tujuan ini dirinci dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi semua pihak terkait agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat dan efektif.
- b. Konsistensi  
Kebijakan harus diterapkan secara konsisten tanpa penurunan kualitas. Pada tahun 2023 terjadi kesalahan pengkodean anggaran Program Paitua di Kabupaten Sorong yang menyebabkan penundaan penyaluran dana. Namun, kesalahan ini telah diidentifikasi dan sedang diperbaiki untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi tidak hanya mencakup pelaksanaan program, tetapi juga ketertiban administrasi dan pengelolaan anggaran.
- c. Penerapan  
Penerapan Program Paitua didukung oleh Surat Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang menjabarkan langkah-langkah rinci pelaksanaan program di lapangan, seperti proses pendaftaran, verifikasi data, penyaluran dana, dan pelaporan. PTO berfungsi

sebagai panduan praktis untuk memastikan keseragaman dan efisiensi dalam pelaksanaan program di semua tingkatan, sehingga setiap tahapan dapat berjalan efektif dan sesuai standar.

### Tahapan Implementasi Program Paitua

Tahapan penetapan penerima manfaat Paitua meliputi:

- a. Penyusunan daftar awal calon penerima berdasarkan data tahun anggaran dan SIAK.
- b. Pengiriman daftar calon penerima ke tingkat distrik dan kampung/kelurahan.
- c. Pembaharuan dan verifikasi daftar calon penerima oleh kepala kampung dan kepala distrik.
- d. Verifikasi dan validasi data di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- e. Penetapan penerima manfaat melalui SK Gubernur.

### 3. Ketersediaan Personil

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan personil yang memadai. Jumlah personil yang kurang dapat menimbulkan hambatan seperti keterlambatan, kurang koordinasi, dan penurunan kualitas layanan, sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas kebijakan.

#### a. Jumlah Personil

Jumlah personil menjadi faktor penentu utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Data Tim Sekretariat Bersama Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

No	Jabatan dalam Instansi	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Bupati Sorong	Yan Piet Mosso	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong	Cliffa Japsenang, S.Sos, M.Si	Ketua
3	Kepala Baperlitbang Kabupaten Sorong	Ir. Maritje Watimena	Sekretaris
4	Kepala BPKAD Kabupaten Sorong	Efer Segidifat, SE.MM	Anggota
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ediswanto, S.Sos, M.Si	Anggota
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong	Amatus Turot, S.Hut., M.Si	Anggota

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sorong, 2023)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/228/11/2023, terdapat 1.485 lansia penerima manfaat Program Perlindungan Hari Tua di Kabupaten Sorong. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan lansia. Namun, Sekretaris Bapedda Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa jumlah personil dalam Tim Sekretariat Bersama saat ini belum mencukupi kebutuhan operasional. Kekurangan ini menyebabkan lambatnya proses penyaluran program, khususnya di kampung-kampung terpencil. Penambahan personil diperlukan agar tim dapat bekerja lebih optimal, membagi tugas secara efektif, dan mempercepat jangkauan wilayah.

#### b. Kualitas Personil

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Personil yang kompeten, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kerjasama tim, pemahaman tugas, dan kemampuan adaptasi akan mendukung kelancaran proses administrasi dan manajerial. Meskipun kualitas personil Tim Sekretariat Bersama umumnya memenuhi standar, keterbatasan jumlah personil tetap menghambat efektivitas kerja, khususnya dalam menjangkau wilayah geografis yang luas dan sulit diakses. Oleh karena itu, penambahan personil juga diperlukan untuk

meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyaluran program. Pengembangan sektor peternakan, khususnya peternakan ayam petelur, tidak hanya bergantung pada dukungan teknis dan modal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam hal ini, keberhasilan program pengembangan peternakan sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya lokal dapat diidentifikasi, diberdayakan, dan diintegrasikan ke dalam proses produksi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan dan program yang mampu mendorong kemandirian masyarakat serta meningkatkan produktivitas usaha peternakan. Salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam pengembangan ini adalah bagaimana sumber daya lokal dapat dikelola secara efektif.

#### **4. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini meliputi alokasi dana, personel yang kompeten, peralatan yang memadai, serta informasi yang akurat. Penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara tepat dan efisien agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sumber daya dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal.

##### **a. Alokasi Sumber Daya**

Alokasi sumber daya mencakup ketersediaan dan distribusi sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sarana dan prasarana berupa fasilitas dan infrastruktur sangat penting untuk kelancaran implementasi kebijakan. Data menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia, seperti kendaraan operasional untuk distribusi ke kampung-kampung, sudah cukup memadai. Namun, akses menuju wilayah perkampungan yang luas dan kondisi geografis yang sulit masih menjadi kendala dalam proses distribusi.

##### **b. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya**

Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga sangat bergantung pada bagaimana sumber daya dialokasikan dan dimanfaatkan dengan benar. Data sebaran penerima manfaat Program PAITUA Tahun Anggaran 2023 memperlihatkan distribusi penerima manfaat sebanyak 13.306 orang, terdiri dari 5.667 lansia laki-laki dan 7.639 lansia perempuan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Distribusi terbesar terpusat di Kota Sorong dengan 6.966 penerima manfaat (sekitar 52% dari total), sedangkan distribusi terkecil berada di Kabupaten Tambrau dengan 647 penerima manfaat. Informasi ini penting untuk mengevaluasi apakah alokasi sumber daya sudah menjangkau kelompok sasaran secara merata di seluruh wilayah cakupan program.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA)**

#### **1. Faktor Pendukung**

Keberhasilan implementasi Program PAITUA sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait. Tim Sekretariat Bersama (Sekber) yang efektif menjadi fondasi utama dalam memastikan koordinasi yang lancar antar elemen program. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti Bank BRI sebagai mitra penyalur bantuan, sangat penting untuk menjamin proses penyaluran berjalan dengan efisien dan transparan. Pelaksanaan evaluasi program secara terstruktur, seperti rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, juga menjadi faktor pendukung dalam mengawasi dan meningkatkan efektivitas program. Dengan adanya koordinasi internal yang solid dan dukungan eksternal yang memadai, tercipta lingkungan kondusif untuk keberhasilan program PAITUA.

#### **2. Faktor Penghambat**

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Program PAITUA di Kabupaten Sorong meliputi:

- a. Jarak antar kampung yang jauh, menyulitkan proses distribusi buku rekening dan bantuan.
- b. Keterbatasan personil dalam penyaluran, menyebabkan proses pembagian menjadi lambat, terutama dalam pengurusan buku rekening dan kartu ATM yang hilang.
- c. Ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan Surat Keputusan (SK).
- d. Kurangnya sosialisasi yang menyebabkan sebagian masyarakat belum mengetahui adanya program PAITUA.
- e. Adanya manipulasi data penerima oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga bantuan tidak sampai pada penerima yang sebenarnya.
- f. Proses verifikasi data yang kurang efektif, khususnya terkait pelaporan kematian yang menyebabkan data penerima masih tercatat aktif.
- g. Kesalahan penempatan kode akun anggaran, misalnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan keuangan tetapi dimasukkan dalam anggaran belanja sosial, yang berdampak pada penghambatan proses penyaluran.
- h. Selain itu, kendala administratif dan pemahaman terhadap peraturan terkait program (seperti Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 dan SOP PAITUA) masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar alokasi anggaran dan pelaksanaan program berjalan lancar.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sinergi dan koordinasi antara Sekretariat Bersama (Sekber) dan mitra penyalur seperti Bank BRI menjadi faktor penting keberhasilan implementasi Program PAITUA. Kolaborasi ini memfasilitasi pelaksanaan program secara efektif, mulai dari verifikasi data hingga penyaluran bantuan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Axelsson (2006) yang menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam sistem pelayanan publik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kwon (2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan perlindungan sosial di Korea Selatan dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor yang terintegrasi. Namun, tantangan geografis menjadi kendala signifikan dalam implementasi program. Kondisi wilayah Kabupaten Sorong yang luas dan sulit dijangkau menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan dan tingginya biaya operasional. Hal ini menguatkan hasil penelitian Jitapunkul dan Wivatvanit (2008) di Thailand, serta Naz et al. (2021) di Pakistan, yang menunjukkan bahwa keterpencilan wilayah menjadi hambatan utama dalam menjangkau populasi lansia di daerah pedesaan. Oleh karena itu, inovasi dalam distribusi bantuan berbasis teknologi dan penguatan jejaring lokal sangat diperlukan. Permasalahan berikutnya adalah ketidaktepatan data penerima manfaat, seperti ketidaksesuaian NIK dan praktik manipulasi data. Masalah ini berdampak langsung pada ketidaktepatan sasaran program. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Yusran (2021) yang menyebutkan bahwa akurasi data merupakan faktor kunci dalam efektivitas program sosial. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan validitas data. Selain itu, sosialisasi program yang masih terbatas menyebabkan banyak lansia tidak mengetahui keberadaan PAITUA. Kondisi ini menunjukkan lemahnya strategi komunikasi pemerintah daerah. Hasil ini senada dengan penelitian Tamba (2022) yang menyoroti kurangnya diseminasi informasi dalam program bantuan lansia di daerah, sehingga menghambat partisipasi kelompok sasaran. Strategi sosialisasi yang melibatkan tokoh adat, gereja, dan komunitas lokal dapat menjadi pendekatan efektif untuk memperluas jangkauan informasi dan menjangkau kelompok rentan. Dari sisi administratif, ditemukan adanya kesalahan penganggaran akibat kurangnya pemahaman staf terhadap regulasi seperti Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023. Temuan ini sejalan dengan pendapat Dwiningtyas et al. (2020) yang menyatakan bahwa kapasitas birokrasi, termasuk pemahaman terhadap prosedur teknis dan regulasi, sangat memengaruhi efektivitas program perlindungan sosial. Oleh sebab itu, pelatihan dan pendampingan teknis bagi petugas administrasi perlu ditingkatkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian, penelitian ini

memperkuat temuan-temuan terdahulu mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor, akurasi data, keterjangkauan layanan, serta strategi komunikasi dan kapasitas administratif dalam pelaksanaan program perlindungan sosial lansia. Namun, kebaruan dari penelitian ini terletak pada konteks geografis dan sosial Kabupaten Sorong yang memiliki karakteristik khusus di wilayah Papua Barat Daya, serta pada analisis peran adaptif pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan pelaksanaan program PAITUA.

### 3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Topik menarik lain yang muncul dari penelitian ini adalah potensi besar pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan program. Aplikasi verifikasi data berbasis digital dan sistem manajemen data terpusat dapat mengurangi kesalahan pendataan dan mempercepat proses validasi penerima manfaat. Selain itu, layanan perbankan digital dapat memudahkan penyaluran bantuan ke penerima manfaat, terutama yang berada di lokasi sulit dijangkau. Pelibatan aktif masyarakat dan organisasi lokal juga sangat penting sebagai pendukung sosialisasi dan verifikasi data, yang pada gilirannya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial juga menjadi prioritas agar petugas lapangan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada secara efektif.

## IV. KESIMPULAN

Implementasi Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa sinergi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat Bersama (Sekber) dan mitra penyalur seperti Bank BRI merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program. Namun, tantangan geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam proses distribusi bantuan dan administrasi program. Permasalahan validitas data penerima manfaat, termasuk ketidaksesuaian data dan praktik manipulasi, menurunkan efektivitas program dan memerlukan penguatan mekanisme verifikasi data dengan melibatkan aparat lokal dan pemanfaatan teknologi informasi. Kurangnya sosialisasi juga menjadi kendala signifikan yang menyebabkan rendahnya partisipasi lansia, sehingga perlu adanya strategi komunikasi yang lebih intensif dan inklusif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Selain itu, kendala administratif, terutama kurangnya pemahaman staf terhadap regulasi dan prosedur pelaksanaan program, mengindikasikan perlunya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan kelancaran dan transparansi pengelolaan program. Secara keseluruhan, keberhasilan PAITUA sangat bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan koordinasi antar-pemangku kepentingan, memperbaiki validitas data, memperluas sosialisasi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta teknologi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain data yang digunakan sebagian besar berasal dari sumber sekunder dan observasi sehingga analisis mengenai pengalaman langsung penerima manfaat dan petugas lapangan kurang mendalam. Selain itu, fokus penelitian hanya pada wilayah Kabupaten Sorong sehingga temuan ini belum tentu dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Penelitian ini juga belum mengeksplorasi dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan lansia, yang memerlukan studi lanjutan dengan metode kuantitatif dan longitudinal untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Sebagai arahan penelitian di masa depan, disarankan untuk melakukan studi dengan metode campuran (*mixed-method*) yang menggabungkan analisis

kuantitatif dan kualitatif untuk menilai dampak sosial ekonomi program secara menyeluruh. Wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan serta studi kasus dapat mengungkap kendala dan kebutuhan spesifik di lapangan. Penelitian terkait pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data serta penyaluran bantuan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Selain itu, kajian tentang peran aktif masyarakat dan organisasi lokal dalam mendukung sosialisasi dan verifikasi data dapat memperkuat partisipasi dan akuntabilitas program. Terakhir, penelitian lintas wilayah dengan karakteristik berbeda akan membantu menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks lokal masing-masing.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, khususnya kepada dinas terkait beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Axelsson, R., & Axelsson, S. B. (2006). Integration and collaboration in public health—a conceptual framework. *The International Journal of Health Planning and Management*, 21(1), 75–88. <https://doi.org/10.1002/hpm.826>
- Costa, D. L. (1999). A house of her own: old age assistance and the living arrangements of older nonmarried women. *Journal of Public Economics*, 72(1), 39–59. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(98\)00094-2](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(98)00094-2)
- de Oliveira, L. da S. S. C. B., Souza, E. C., Rodrigues, R. A. S., Fett, C. A., & Piva, A. B. (2019). The effects of physical activity on anxiety, depression, and quality of life in elderly people living in the community. *Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, 41(1), 36–42. <https://doi.org/10.1590/2237-6089-2017-0129>
- Graham, C. (2010). Accounting and the construction of the retired person. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 23–46. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.03.001>
- Hasson, H., Blomberg, S., & Dunér, A. (2012). Fidelity and moderating factors in complex interventions: a case study of a continuum of care program for frail elderly people in health and social care. *Implementation Science*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-7-23>
- Jitapunkul, S., & Wivatvanit, S. (2008). National Policies and Programs for the Aging Population in Thailand. *Ageing International*, 33(1–4), 62–74. <https://doi.org/10.1007/s12126-009-9027-6>
- Kanamori, S., Kai, Y., Aida, J., Kondo, K., Kawachi, I., Hirai, H., Shirai, K., Ishikawa, Y., & Suzuki, K. (2014). Social Participation and the Prevention of Functional Disability in Older Japanese: The JAGES Cohort Study. *PLoS ONE*, 9(6), e99638. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099638>
- Karasek, M. (2004). Melatonin, human aging, and age-related diseases. *Experimental Gerontology*, 39(11–12), 1723–1729. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2004.04.012>
- Kwon, S. (2008). Future of Long-Term Care Financing for the Elderly in Korea. *Journal of Aging & Social Policy*, 20(1), 119–136. [https://doi.org/10.1300/J031v20n01\\_07](https://doi.org/10.1300/J031v20n01_07)
- Lee, E. E., Depp, C., Palmer, B. W., Glorioso, D., Daly, R., Liu, J., Tu, X. M., Kim, H.-C., Tarr, P., Yamada, Y., & Jeste, D. V. (2019). High prevalence and adverse health effects of loneliness in community-dwelling adults across the lifespan: role of wisdom as a protective factor. *International Psychogeriatrics*, 31(10), 1447–1462. <https://doi.org/10.1017/S1041610218002120>
- Lutomski, J. E., Baars, M. A. E., Schalk, B. W. M., Boter, H., Buurman, B. M., den Elzen, W. P. J., Jansen, A. P. D., Kempen, G. I. J. M., Steunenbergh, B., Steyerberg, E. W., Olde Rikkert, M. G. M., & Melis, R. J. F. (2013). The Development of the Older Persons and Informal Caregivers Survey

- Minimum DataSet (TOPICS-MDS): A Large-Scale Data Sharing Initiative. *PLoS ONE*, 8(12), e81673. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081673>
- Meng, Q., Fang, H., Liu, X., Yuan, B., & Xu, J. (2015). Consolidating the social health insurance schemes in China: towards an equitable and efficient health system. *The Lancet*, 386(10002), 1484–1492. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00342-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00342-6)
- Naz, L., Ghimire, U., & Zainab, A. (2021). Behavioral factors associated with utilization of healthcare services among elderly in Pakistan: evidence from a nationally representative survey. *BMC Geriatrics*, 21(1), 42. <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02005-3>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*. Media Sahabat Cendekia.
- Pei, X., & Tang, Y. (2010). Old Age Protection in the Context of Rural Development. *IDS Bulletin*, 41(4), 22–30. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2010.00149.x>
- Pei, X., & Tang, Y. (2012). Rural Old Age Support in Transitional China: Efforts Between Family and State. In *Aging in China* (pp. 61–81). Springer US. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8351-0\\_5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8351-0_5)
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantauandan Kecamatan Rantauandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik - Legalistik - Empirik - Inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Tengku Mohd, T. A. M., Yunus, R. M., Hairi, F., Hairi, N. N., & Choo, W. Y. (2019). Social support and depression among community dwelling older adults in Asia: a systematic review. *BMJ Open*, 9(7), e026667. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026667>

